



Azwar dan Achmat Subekan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia

azwar.iskandar@gmail.com,

achmatsubekan@gmail.com



DETERMINANT ANALYSIS OF POVERTY IN SOUTH SULAWESI

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

ABSTRACT/ABSTRAK

This research is aimed to analyze the determinant of poverty in South Sulawesi on 2010-2014 period. Using the annual data from Badan Pusat Statistik (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), the estimation applies the Panel Regression with Random Effect Model (REM) as analytical tool in order to analyze the effect of regional economic growth, unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure on poverty in South Sulawesi. The empirical results show that all determinant variables simultaneously have a positive significant effect on poverty. Meanwhile, regional economic growth partially have a positive effect on poverty. The others such as unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure partially have a negative effect on poverty. Because of that matters, local government shall to create an economic growth inclusively, improve the health and education public infrastructures, and increase the supervision of expenditures to keep going effective and efficient in the poverty reduction effort.

KEYWORDS:

poverty, South Sulawesi, panel data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan. Dengan teknik *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan.

KATA KUNCI:

kemiskinan, Sulawesi Selatan, data panel

SEJARAH ARTIKEL:

Diterima pertama: Maret 2016

Dinyatakan dapat dimuat : Mei 2016

PENDAHULUAN

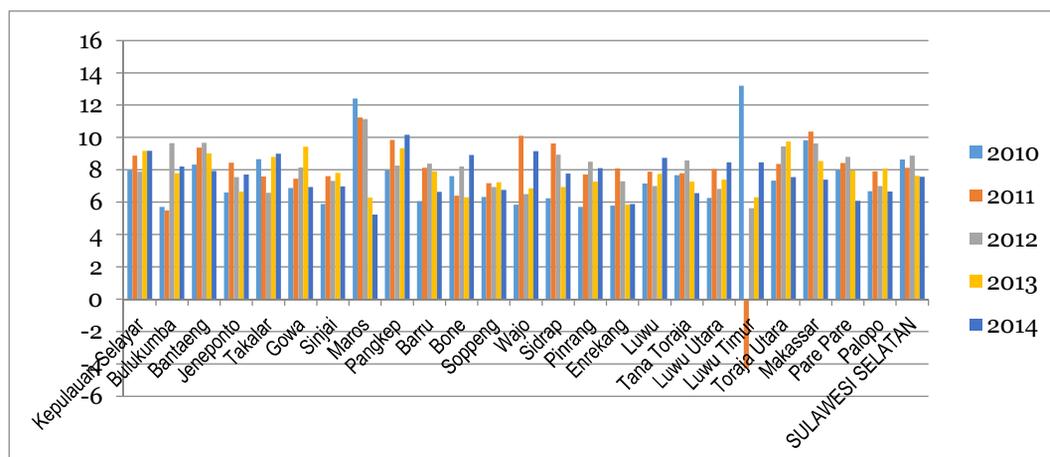
Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan program lainnya (Hureirah, 2005). Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5% - 7% per tahun sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Meskipun peringkat Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal laju pertumbuhan ekonomi tergolong tidak mengecewakan, yaitu berada pada peringkat 38 dari 179 negara (IMF, 2015), namun pertumbuhan tersebut dirasa belum memberi dampak yang berarti terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terakhir dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 28,5 juta jiwa. Hampir 15% dari jumlah penduduk Indonesia di pedesaan dan hampir 10% jumlah penduduk Indonesia di perkotaan dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan. Fakta tersebut menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian yang besar dari semua pihak.

Sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya misalnya peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan *entrepreneurship* (Hureirah, 2005).

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, dengan terlebih dahulu mengkaji faktor-faktor penyebab (determinan) kemiskinan tersebut di daerah. Di antara faktor yang perlu dikaji seperti pertumbuhan ekonomi regional di daerah, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh BPS hingga akhir Desember 2014, penduduk dengan keadaan miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 806.350 jiwa. Angka ini setara dengan 9,54 persen dari total penduduk yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin ini sebagian besar masih didominasi oleh daerah pedesaan yang mencapai 12,25 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 4,93 persen (BPS dalam Saubani, 2015).



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2014)

Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tampaknya akan meningkat disebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat. Pada Februari 2015, angka TPT mencapai 5,8 persen atau sekitar 218.311 pengangguran. Nilai ini meningkat karena pada Februari 2014 tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencapai 212.857 pengangguran atau meningkat 5.454 dalam satu tahun (BPS dalam Saubani, 2015).

Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan, dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin turun atau bahkan tidak ada. Namun, fakta yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi hal yang perlu dicermati dan dikaji ulang khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Keberadaan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih relatif besar, dapat menegaskan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara

masif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin. Dalam konteks ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan berbagai program pengentasan kemiskinan dan langkah konstruktif lainnya seperti pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan angka kemiskinan 10 persen per tahun, mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, menempatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai substansi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat dinilai – atau setidaknya dipersepsi - belum berhasil di Provinsi Sulawesi Selatan. PNPM boleh jadi berhasil pada tataran *output* (memperbaiki saluran irigasi, jalan desa, lingkungan pemukiman, dsb.), tetapi tentu saja tidak berhasil pada tataran *impact* (mengurangi jumlah penduduk miskin). Berbagai upaya tersebut tampaknya tidak berjalan paralel dengan penurunan angka kemiskinan, setidaknya untuk September 2011. Kondisi ini tampaknya kian menegaskan kembali bahwa “keberhasilan tidak berada di ranah rencana, tetapi di ranah tindakan” (Agussalim, 2012).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase Penduduk Miskin (%)							
Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bantaeng	10.94	9.96	10.25	9.21	8.9	10.45	9.68
Barru	13.49	11.43	10.69	9.59	9.28	10.32	9.74
Bone	17.35	15.19	14.08	12.67	12.25	11.92	10.88
Bulukumba	12.26	10.5	9.02	8.12	7.83	9.04	8.37
Enrekang	20.51	18.1	16.86	15.18	14.45	15.11	13.9
Gowa	12.79	10.93	9.49	8.55	8.06	8.73	8
Jeneponto	22.48	20.58	19.1	17.16	16.59	16.52	15.31
Luwu Timur	10.98	8.91	9.18	8.29	7.72	8.38	7.67
Luwu Utara	18.38	16.4	16.25	14.64	14.03	15.52	14.31
Luwu	19.44	16.96	15.44	13.93	13.34	15.1	13.95
Makassar	5.36	5.52	5.86	5.29	5.02	4.7	4.48
Maros	18.55	16.35	14.62	13.14	12.56	12.94	11.93
Palopo	12.83	11.85	11.28	10.22	9.47	9.57	8.8
Pangkep	21.36	19.35	19.26	17.36	16.63	17.75	16.38
Pare Pare	7.1	6.52	6.53	5.91	5.58	6.38	5.88
Pinrang	9.65	8.7	9.01	8.12	7.83	8.86	8.2
Kep. Selayar	18.49	16.41	15	13.49	12.87	14.23	13.13
Sidrap	7.64	6.73	7	6.29	6	6.3	5.82
Sinjai	12.73	11.37	10.68	9.63	9.29	10.32	9.56
Soppeng	11.22	9.95	10.42	9.36	9.12	9.43	8.76
Takalar	12.68	11.06	11.16	10.04	9.6	10.42	9.62
Tana Toraja	18.57	16.14	14.62	13.22	12.73	13.81	12.77
Toraja Utara	0	0	19.08	17.06	16.28	16.53	15.1
Wajo	10.16	8.93	8.96	8.06	7.83	8.17	7.74
Total	13.41	11.93	11.4	10.27	9.82	10.32	9.54

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2014)

Oleh karena itu, dengan gambaran latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah. Kajian determinan kemiskinan ini akan difokuskan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada alasan bahwa provinsi ini merupakan salah satu representasi utama perekonomian Indonesia bagian timur dan mencatat tingkat laju kemiskinan tertinggi di kawasan Sulawesi dan Maluku dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS

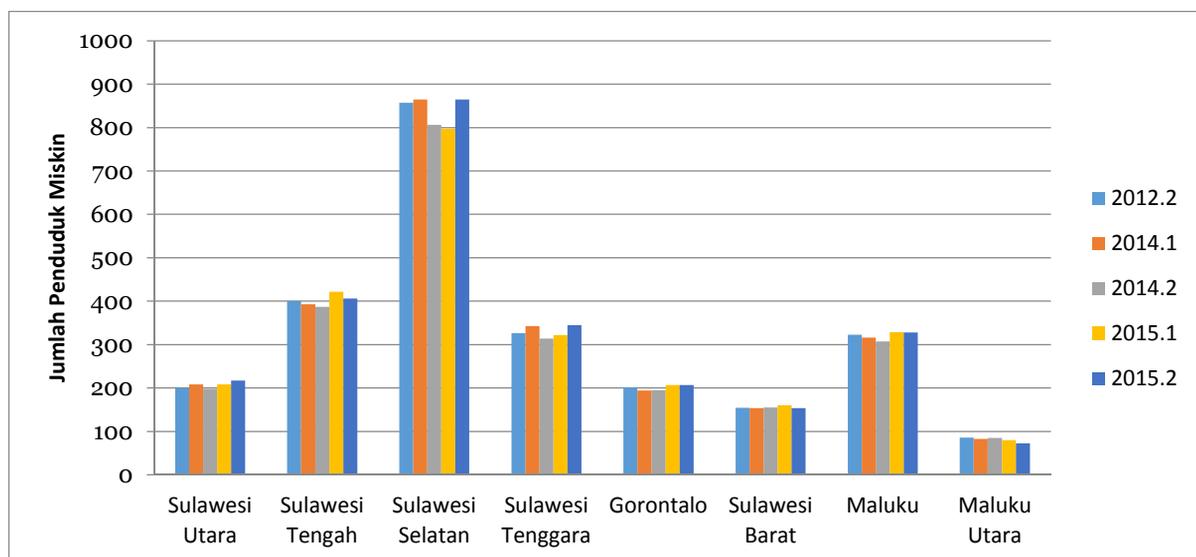
per September tahun 2015, jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 864.510.000 jiwa.

Faktor determinan yang dipilih dalam kajian ini adalah beberapa faktor yang telah terbukti dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju tingkat kemiskinan di daerah dalam beberapa penelitian terdahulu. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengangguran terbukti signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,

penelitian oleh Ramadhan (2014) menemukan bahwa pengeluaran atau belanja daerah dan Angka Harapan Hidup sebagai proksi faktor kesehatan terbukti signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan penelitian oleh Hudaya (2009) yang menemukan bahwa Angka Melek Huruf sebagai indikator faktor tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan faktor-faktor tersebut untuk memprediksi pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan yang mengemuka yaitu: (i) bagaimana pertumbuhan ekonomi regional daerah, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan? (ii) bagaimana pengaruh masing-masing variabel tersebut secara terpisah (sendiri-sendiri) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan? (iii) rekomendasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi

Selatan? Terdapat pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Agussalim (2012) di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif dengan model eksplorasi kualitatif yang mendalam. Adapun penelitian ini mencoba melihat determinan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan yang berbeda yakni dengan metode pendekatan statistik inferensial.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan fenomena angka kemiskinan yang terjadi karena pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait topik penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menguatkan dan mendukung hasil penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang juga dilakukan di wilayah yang sama serta menambah referensi penelitian berikutnya dalam bidang keuangan publik, khususnya dalam kajian terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.



Grafik 2. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sulawesi dan Maluku Tahun 2013.2 – 2105.2
Sumber: BPS (2015)

Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini, penulis terlebih dahulu menyebutkan beberapa kajian teori yang terkait dengan topik penelitian baik yang bersumber dari beberapa literatur maupun penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu penulis mengembangkan kerangka hipotesis sebagai acuan untuk melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan penelitian.

Kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*); (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Sedangkan menurut BPS bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi (Ravillion, 2001). Ciri masyarakat miskin adalah: (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan

yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya/nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang (Ramadhan, 2014).

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (World Bank, 2002).

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk

menentukan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor-faktor mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tambunan, 2001).

Menurut World Bank (2006), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani, 2005):

a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).

c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.

d. *Financial assets*: berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.

e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan

Menurut Todaro (2006), Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam Mankiw (2006). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang

tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ravalion & Bidani (1996), Son & Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) juga memberikan kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiw. Menurut Ravalion & Bidani (1996), Son & Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) setelah melakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim, 2009).

Adams (2004) juga melihat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pendapatan rata-rata. Terdapat hubungan yang kuat secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Untuk itu Hasan & Quibria (2002) mengatakan bahwa tidak ada lagi yang meragukan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan angka kemiskinan. Apa yang dikemukakan oleh Adams, Hasan dan Quibria dipertegas kembali oleh Siregar & Wahyuniarti (2007). Mereka menemukan bahwa setiap pertumbuhan 1 Triliun dalam output akan menurunkan sekitar 9.000 orang miskin.

Hubungan pengangguran dengan kemiskinan

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Terdapat hubungan yang erat antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Menurut Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang

lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

Hubungan indeks kesehatan dengan kemiskinan

Angka Indeks Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan *output*.

Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Myrdal (2000) bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Angka Harapan Hidup (AHH) maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Hubungan angka partisipasi sekolah (pendidikan) dengan kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Menurut Todaro (2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Ia juga menyatakan bahwa

pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian Hermanto & Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani, 2005).

Hubungan belanja daerah dengan kemiskinan

Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2005) menegaskan peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan guna membuat program

pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang ditemukan oleh Hasibuan diperkuat oleh Alawi (2006). Alawi menemukan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat maka akan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan.

Todaro (2006) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan sosial (*social chaos*).

Pengembangan hipotesis

Pertumbuhan ekonomi dalam banyak negara berkembang, baik secara nasional maupun regional di daerah, tidak menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah. Pertumbuhan ekonomi yang ada secara statistik nampaknya belum mencerminkan gambaran secara langsung kondisi sosial dalam masyarakat, termasuk pula belum memadainya berbagai sektor yang menyangkut kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya dipacu oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain: (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif

daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai objek daripada subjek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2002). Dari penjelasan ini, penulis memberikan hipotesis terkait hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan bahwa:

H₁ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Artinya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, bisa jadi tidak diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Yang ada adalah pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat memicu tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan mungkin saja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang lebih signifikan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Selanjutnya, di antara bentuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat makro adalah dengan menjadikan sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan) lebih dioptimalkan dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Agussalim, 2012). Dari penjelasan ini, penulis memberikan hipotesis terkait hubungan pengangguran dengan kemiskinan bahwa:

H₂ : Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Artinya, jika pengangguran tidak dapat diatasi dengan baik sehingga terus meningkat, maka

hal tersebut akan mengakibatkan melonjaknya angka kemiskinan di masyarakat. Sehingga melalui upaya perluasan lapangan kerja, diharapkan kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa ditekan, sehingga pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan.

Bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya melalui program-program yang dapat menurunkan beban penduduk miskin dalam jangka pendek yang seharusnya digalakkan oleh pemerintah daerah adalah melalui program yang meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dalam jangka waktu pendek beban biaya penduduk miskin menurun serta dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya produktivitas penduduk miskin sehingga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penduduk miskin meningkat (Agussalim, 2012). Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang memadai akan meningkatkan produktivitas, daya kerja dan output masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terlepas dari jerat kemiskinan. Dari penjelasan ini, penulis memberikan hipotesis terkait hubungan indeks kesehatan dan angka partisipasi sekolah (pendidikan) dengan kemiskinan bahwa:

H₃ : Indeks Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

H₄ : Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Artinya, jika indeks kesehatan dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah meningkat, diharapkan tingkat kemiskinan di daerah dapat menurun.

Terkait dengan belanja pemerintah, menurut World Bank (2006) dalam laporan Era Baru

dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia bahwa disamping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran dan belanja untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Dari penjelasan ini, penulis memberikan hipotesis terkait hubungan belanja daerah dengan kemiskinan bahwa:

H5 : Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Artinya, belanja daerah yang besar diharapkan dapat berimplikasi terhadap menurunnya angka kemiskinan.

Terhadap seluruh variabel yang dimasukkan dalam model penelitian ini yaitu berupa pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah sebagai variabel-variabel independen (bebas) dalam memberikan pengaruhnya secara simultan (bersama-sama) terhadap angka kemiskinan, penulis memberikan hipotesis bahwa:

H6 : Pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Data, Sampel, Populasi dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dilihat dari cara memperolehnya, data yang digunakan digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain. Data diperoleh dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari 2010 sampai 2014. Sedangkan data *cross section*-nya adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar pada laporan institusi terkait (BPS dan DJPK) yang memuat data/informasi yang terkait dengan penelitian secara lengkap (inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional) dari tahun 2010 hingga 2014;

2. Kabupaten/kota telah berdiri sebelum desentralisasi fiskal atau otonomi daerah diberlakukan dan bukan merupakan kabupaten/kota hasil pemekaran pada periode penelitian.

Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel di atas, maka kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 Kabupaten/Kota.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah sebagai variabel-variabel independen (bebas). Operasionalisasi masing-masing variabel penelitian ditetapkan pada tabel 2.

Teknik analisis data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis data panel adalah suatu metode regresi terhadap gabungan dari data antarwaktu (*timeseries*) dan data antarindividu (*cross section*).

Uji normalitas dan asumsi klasik

Mengingat teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, maka terhadap data juga dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik untuk memperoleh hasil estimasi regresi yang memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yakni mempunyai sifat linier, tidak bias, dan varian minimum.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hal ini dilakukan karena regresi mensyaratkan distribusi

error yang normal, artinya nilai *error* terdistribusi secara simetris di sekitar *mean* (Ghazali, 2005).

Dalam aplikasi *Eviews*, uji normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji *Jarque-Bera* (JB) dapat diperoleh dari histogram *normality*. Hipotesis dalam uji normalitas yang digunakan dengan *alpha* (α) 5% adalah :

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung $>$ *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak. Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung $<$ *Chi Square* tabel, maka H_0 diterima.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Manurung (2005) menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan *Park Test*, *Glejser Test*, *Spearman's Rank Correlation Test*, *Golfeld-Quandt Test*, *Breusch-Pagan-Godfrey Test*, *White's General*

Heteroscedasticity Test, dan *Koenker-Basset Test*.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Terikat		Deskripsi	
Kemiskinan (KM)	Tingkat Kemiskinan di daerah <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa nilai <i>Head Count Index</i> (HCI) yang menunjukkan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Rumus Penghitungan : $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left \frac{z - y_i}{z} \right $ Dimana : $\alpha = 0$ $Z =$ garis kemiskinan $y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ $q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $n =$ jumlah penduduk	
Variabel Bebas		Deskripsi	Espektasi
Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)	Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota, 2010-2014 (Milyar Rupiah) [Seri 2010] pada periode tertentu.	+
Pengangguran (PGR)	Tingkat Pengangguran Daerah <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja dan pengangguran pada kabupaten/kota pada periode tertentu.	+
Indeks Kesehatan (IK)	Nilai Indeks Kesehatan kabupaten/kota <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa nilai rasio indeks/tingkat kesehatan masyarakat pada kabupaten/kota pada periode tertentu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Sulawesi Selatan.	-
Angka Parsipasi Sekolah (SKL)	Jumlah partisipasi murni sekolah kabupaten/kota <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa persentase jumlah total partisipasi murni sekolah masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SLTP dan SLTA) pada kabupaten/kota pada periode tertentu.	-
Belanja Daerah (BD)	Jumlah total belanja daerah kabupaten/kota <i>i</i> pada periode <i>t</i>	Berupa jumlah belanja yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung (dalam milyaran rupiah).	-

Sumber: BPS dan DJPK

Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Persamaan regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika tingkat korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,95 (Ghazali, 2005).

Pengujian pemilihan model

Setelah uji asumsi klasik untuk regresi berganda terpenuhi, maka untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu :

1. Model *Common Effect*

Teknik ini sama pada analisis data *cross section* dan *time series* karena mengasumsikan bahwa koefisien *intercept* dan *slopanya* sama (konstan) untuk setiap data *cross section* dan *time series*. Dengan kata lain model ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu. Namun, untuk melakukan regresinya perlu menggabungkan data *cross section* dan *time series* yang biasa disebut *pool data*.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Teknik Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) sudah memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Pada model ini efek dimensi individu dan waktu terletak pada *intercept* dan *slope* pada model. Sehingga pada model ini menganggap bahwa yang sangat mempengaruhi variabel dependen adalah *slope* dan *intercept*.

3. Model Efek Random (*Random Effect*)

Teknik ketiga ini hampir sama dengan Model *Fixed Effect* karena memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Namun model ini beranggapan bahwa efek dimensi tersebut terletak pada *error* dari model.

Menurut Winarno (2007), langkah-langkah pengujian pemilihan model data panel secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Estimasi dengan *Fixed Effect*
2. Uji Chow (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* > dari 0,05), maka yang dipilih adalah model *Common Effect* (selesai sampai disini). Jika H_0 ditolak (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* < dari 0,05), maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect* (lanjut ke langkah 3).
3. Estimasi dengan *Random Effect*
4. Uji Hausman (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai probabilitas *cross-section random* > dari 0,05), maka dipilih model *Random Effect*. Jika H_0 ditolak (jika nilai probabilitas *cross-section random* < dari 0,05), maka dipilih model *Fixed Effect*.

Sesuai dengan variabel dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan model empiris regresi data panel sebagai berikut :

$$KM_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PGR_{it} + \beta_3 IK_{it} + \beta_4 SKL_{it} + \beta_5 BD_{it}$$

dimana :

KM_{it} = Kemiskinan

$PDRB_{it}$ = Pertumbuhan Ekonomi

PGR_{it} = Pengangguran

IK_{it} = Indeks Kesehatan

SKL_{it} = Angka Partisipasi Sekolah

BD_{it} = Belanja Daerah

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan uji sebagai berikut :

1. Uji statistik t (Secara Parsial).

Menurut Ghazali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikan (*Prob*) > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan (*Prob*) \leq 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Statistik F (Secara Simultan).

Menurut Ghazali (2005) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dimana H_a diterima apabila *Prob (F-statistic)* < α dan H_a ditolak apabila *Prob(F-statistic)* > α . Dalam hal ini $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Residual Test* dan *Histogram Normality Test* melalui aplikasi *Eviews*, diperoleh hasil seperti yang disajikan pada gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung sebesar 4,95329. Sementara nilai *Chi Square* dengan melihat jumlah variabel independen yang kita pakai dalam hal ini 5 (lima) variabel independen ($df=5$) dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, diperoleh nilai *Chi Square* tabel sebesar 11,070. Hal ini berarti bahwa nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung lebih besar dari nilai *Chi Square* ($4,95329 < 11,070$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal (H_0 diterima).

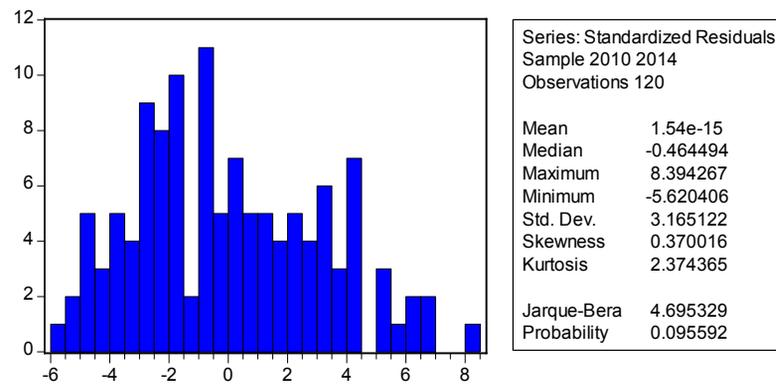
Hasil uji heteroskedastisitas

Hasil uji untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal yaitu dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Grafik plot hasil uji dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji multikolinearitas

Hasil pengujian korelasi antarvariabel independen pada aplikasi *Eviews* untuk melihat



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: hasil olah data

adanya masalah atau gejala multikolinearitas, diperoleh tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, diperoleh hasil bahwa seluruh nilai korelasi antarvariabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,95. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil Pengujian Pemilihan Model

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pada analisis regresi data panel terdapat beberapa langkah dalam pengujian pemilihan model. Berikut hasil pengujian dalam beberapa tahapan tersebut.

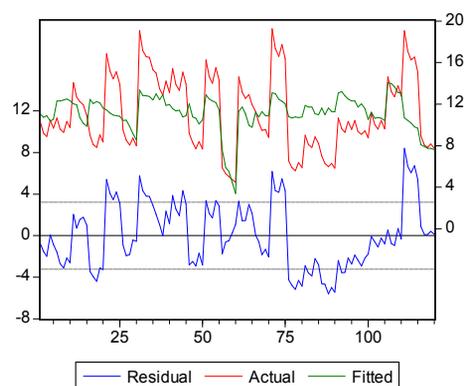
Pertama, hasil estimasi *Common Effect* dan *Fixed Effect* sebagaimana tampak pada tabel 4 dan tabel 5.

Kedua, hasil uji *Chow* dengan menggunakan *Redundant Fixed Effects Tests* untuk menentukan model yang digunakan apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect* sebagaimana tampak pada tabel 6.

Dari tabel 4 diperoleh nilai *Prob Cross Section F* dan *Prob Chi Square* masing-masing 0,0000 dan 0,0000 yang lebih kecil dari α 0,05, sehingga kita menolak hipotesis nol (H_0 ditolak). Maka, berdasarkan hasil uji *Chow*, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Fixed Effect*.

Ketiga, hasil estimasi *Random Effect* sebagaimana tampak pada tabel 7.

Keempat, hasil uji Hausman dengan menggunakan *Correlated Random Effects - Hausman Test* untuk menentukan model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect* sebagaimana tampak pada dari tabel 8.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: hasil olah data

Dari Tabel 8, diperoleh nilai *Prob Cross-section Random* adalah 0,8719 yang lebih besar dari *alpha* 0,05, sehingga kita menerima hipotesis nol (H_0 diterima). Maka, berdasarkan hasil uji Hausman, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Random Effect*.

Setelah melalui pengujian asumsi normalitas dan asumsi klasik serta pemilihan model, maka dapat diperoleh estimasi persamaan regresi data panel berdasarkan metode *Random Effect* sebagai berikut:

$$KM_{it} = 46,63 + 2,68PDRB_{it} - 8,94PGR_{it} - 0,43IK_{it} - 0,004SKL_{it} - 2,79BD_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel di atas, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2,68, dimana tanda positif (+) menandakan adanya hubungan positif, yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan naik sebesar 2,68 persen. Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ravallion & Bidani (1996), Son & Kakwani (2003), Todaro (2006), Bourguignon (2004) & Mankiw (2006) bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi terkadang hanya berasal dari sejumlah golongan masyarakat sehingga manfaat dari pertumbuhan tidak bersifat inklusif yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah (meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada variabel makro-ekonomi, terutama arus penanaman modal dan peningkatan ekspor, memang seringkali tidak memiliki kaitan yang kuat dengan pengentasan penduduk miskin. Kaitan tersebut menjadi semakin lemah, ketika arus penanaman modal tersebut lebih banyak bergerak pada usaha padat modal (misalnya, industri telekomunikasi) dan sektor-sektor

yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan; hotel dan restoran; listrik, air bersih dan gas). Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) ataupun pertumbuhan berkualitas (*the quality of growth*) ataupun pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor growth*), sebagai sebuah terminologi baru dalam wacana pembangunan dewasa ini, perlu didorong dan diintensifkan di Sulawesi Selatan, baik pada tingkatan rencana maupun pada tingkatan implementasi. Konsep ini lebih mementingkan “dampak” ketimbang sekedar angka statistik. Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif, berkualitas atau berpihak kepada kaum miskin jika mampu mengurangi angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, memperbaiki distribusi pendapatan, mengangkat taraf hidup masyarakat kelas bawah, dan seterusnya.

Hal menarik dari hasil ini adalah bahwa nilai koefisien regresi variabel pengangguran bertanda negatif (-) sebesar 8,94. Hal ini berarti bahwa jika tingkat pengangguran meningkat, maka kemiskinan justru akan turun. Hal ini bisa dijelaskan bahwa peningkatan jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan di satu sektor usaha justru diikuti oleh pengurangan kemiskinan di sektor usaha yang lain karena terjadinya pergeseran distribusi pendapatan masyarakat antarsektor usaha. Perubahan struktur ekonomi pada berbagai sektor usaha yang mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan sektoral tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran daya beli dari pemilik faktor produksi yang sektor usahanya mengecil perannya ke pemilik faktor produksi yang tengah berkembang. Pengaruh negatif ini menandakan bahwa di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha, yaitu dari sektor usaha yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan, telekomunikasi, hotel dan

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	PGR	IK	SKL	BD
PDRB	1	0.904	0.259	-0.010	0.85
PGR	0.904	1	0.239	-0.203	0.70
IK	0.259	0.239	1	0.083	0.126
SKL	-0.0102	-0.203	0.083	1	0.141
BD	0.857	0.702	0.126	0.141	1

Sumber: hasil olah data

Tabel 4. Estimasi *Commont Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3,688,501	8,206,707	4,494,496	0.0000
PDRB	-1.66E-05	6.96E-05	-0.238864	0.8116
PGR	2.23E-05	6.82E-05	0.326802	0.7444
IK	-0.377773	0.099983	-3,778,358	0.0003
SKL	0.023159	0.019546	1,184,869	0.2385
BD	-3.63E-06	2.01E-06	-1,806,279	0.0735
<i>R-squared</i>	0.236756	<i>Mean dependent var</i>		1,109,958
<i>Adjusted R-squared</i>	0.203280	<i>S.D. dependent var</i>		3,622,920

Sumber: hasil olah data

Tabel 5. Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,263,215	5,831,000	1,245,621	0.2161
PDRB	2.72E-05	3.41E-05	0.798962	0.4264
PGR	-2.94E-06	2.33E-05	-0.126371	0.8997
IK	-0.792754	0.794255	-0.998111	0.3209
SKL	-0.003910	0.008018	-0.487667	0.6270
BD	-2.52E-06	1.00E-06	-2,520,865	0.0134
<i>R-squared</i>	0.972766	<i>Mean dependent var</i>		1,109,958
<i>Adjusted R-squared</i>	0.964387	<i>S.D. dependent var</i>		3,622,920

Sumber: hasil olah data

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106,928,145	23.91	0.0000
Cross-section Chi-square	399,975,040	23	0.0000

Sumber: hasil olah data

Tabel 7. Estimasi *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	4,663,852	1,609,896	2,896,989	0.0045
PDRB	2.68E-05	2.94E-05	0.911518	0.3639
PGR	-8.94E-06	2.20E-05	-0.406207	0.6854
IK	-0.439399	0.219096	-2,005,511	0.0473
SKL	-0.004341	0.007262	-0.597790	0.5512
BD	-2.79E-06	8.83E-07	-3,159,239	0.0020
<i>R-squared</i>	0.344095	<i>Mean dependent var</i>		0.962018
<i>Adjusted R-squared</i>	0.315327	<i>S.D. dependent var</i>		0.814710

Sumber: hasil olah data

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	1,832,117	5	0.8719

Sumber: hasil olah data

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	2,896,989	0.0045
PDRB	0.911518	0.3639
PGR	-0.406207	0.6854
IK	-2,005,511	0.0473
SKL	-0.597790	0.5512
BD	-3,159,239	0.0020

Sumber: hasil olah data

Tabel 10. Hasil Uji F

<i>Weighted Statistics</i>	<i>F-statistic</i>	<i>Prob (F-statistic)</i>
	1,196,114	0.000000

Sumber: hasil olah data

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Uji Data Penelitian Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji Data Penelitian

<i>Variabel</i>	<i>Uji</i>	<i>Tanda</i>	<i>Signifikansi</i>	<i>Hipotesis</i>
PDRB	<i>t-statistic</i>	+	Tidak signifikan	Ditolak
PGR		-	Tidak signifikan	Ditolak
IK		-	Signifikan	Diterima
SKL		-	Tidak signifikan	Ditolak
BD		-	Signifikan	Diterima
Simultan	<i>F-statistic</i>	+	Signifikan	Diterima

Sumber: hasil olah data

restoran) ke sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan). Sehingga nampaknya ketika di satu sisi yaitu sektor usaha dengan elastisitas penyerapan rendah terdapat peningkatan pengangguran, di sisi lain yaitu di sektor usaha yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi justru mengalami penurunan tingkat pengangguran, sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat di sektor-sektor tersebut. Hal ini dapat dipahami karena sektor usaha di bidang pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan masih menjadi primadona di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah juga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nilai koefisien variabel-variabel tersebut dengan tanda negatif (-) menunjukkan bahwa jika pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan turun karena pengaruh variabel-variabel tersebut masing-masing sebesar 8,94 persen, 0,43 persen, 0,004 persen dan 2,79 persen. Hasil ini mendukung pernyataan dan hasil riset yang dilakukan oleh Arsyad (1999), Criswardani (2005), Todaro (2006) & Hermanto dan Dwi (2007).

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik t (Secara Parsial).

Berdasarkan hasil uji *t-statistic* estimasi model *Random Effect* pada Tabel 9, diperoleh nilai *Prob (t-statistic)* masing-masing variabel bebas yaitu PDRB, PGR, IK, SKL dan BD sebesar 0,3639 ($> 0,05$), 0,6854 ($> 0,05$), **0,0473** ($< 0,05$), 0,5512 ($> 0,50$) dan **0,0020** ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial :

- Variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh **positif** yang **tidak signifikan** terhadap variabel kemiskinan (KM). Dengan

pembuktian ini, maka **H₁ penelitian ini ditolak**;

- Variabel pengangguran (PGR) memiliki pengaruh **negatif** yang **tidak signifikan** terhadap variabel kemiskinan (KM). Dengan pembuktian ini, maka **H₂ penelitian ini ditolak**;
- Variabel indeks kesehatan (IK) memiliki pengaruh **negatif** yang **signifikan** terhadap variabel kemiskinan (KM). Dengan pembuktian ini, maka **H₃ penelitian ini diterima**;
- Variabel angka partisipasi sekolah (SKL) memiliki pengaruh **negatif** yang **tidak signifikan** terhadap variabel kemiskinan (KM). Dengan pembuktian ini, maka **H₄ penelitian ini ditolak**;
- Variabel belanja daerah (BD) memiliki pengaruh **negatif** yang **signifikan** terhadap variabel kemiskinan (KM). Dengan pembuktian ini, maka **H₅ penelitian ini diterima**;

2. Uji Statistik F (Secara Simultan).

Berdasarkan hasil uji *F-statistic* estimasi model *Random Effect* pada tabel 10 diperoleh nilai *Prob (F-statistic)* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Dengan pembuktian ini, maka **H₆ penelitian ini diterima**.

Secara ringkas rekapitulasi hasil uji data penelitian dapat digambarkan sebagaimana tabel 11.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi regional di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dimana dalam penelitian ini diwakili oleh

- Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku terbukti memiliki pengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun dengan tingkat pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada sejatinya belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi belum menyebar merata pada seluruh lapisan masyarakat;
2. Jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun dengan tingkat pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan di satu sektor usaha, justru diikuti oleh pengurangan kemiskinan di sektor usaha yang lain karena terjadinya pergeseran distribusi pendapatan masyarakat sektor usaha padat karya;
 3. Indeks Kesehatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti bahwa ketika kondisi kesehatan masyarakat itu meningkat maka produktivitas, daya kerja dan output masyarakat juga akan meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terlepas dari jerat kemiskinan, yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan;
 4. Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun dengan tingkat pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa ketika pembangunan modal manusia (*human capital*) yang diwujudkan dengan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan itu meningkat, maka angka kemiskinan akan menurun;
 5. Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja daerah pemerintah yang selama ini (paling tidak dalam lima tahun terakhir) memiliki kecenderungan secara umum terus meningkat telah mampu memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara nyata (signifikan);
 6. Seluruh variabel dalam model penelitian berupa pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai implikasi dari pembuktian empiris penelitian dalam rangka untuk menekan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau yang bersifat inklusif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan menjadikan sektor-sektor yang *intensif labor* atau padat karya sebagai *leading* sektor sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang terus-menerus tumbuh, sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengurangan kemiskinan dapat tercapai;
 - b. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Sulawesi Selatan, pada tingkatan mikro, program-program yang diarahkan untuk menekan beban

pengeluaran penduduk miskin di satu sisi, dan meningkatkan produktivitas penduduk miskin di sisi lain, harus terus diintensifkan. Program layanan pendidikan dan kesehatan untuk rumah tangga miskin perlu terus dilanjutkan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas. Program semacam ini, disamping dapat menekan beban pengeluaran penduduk miskin dalam jangka pendek, juga dapat memperbaiki kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia penduduk miskin dalam jangka panjang. Menyertai usaha tersebut, program-program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas penduduk miskin juga harus terus diupayakan dan ditingkatkan intensitas dan jangkauannya, misalnya melalui pemberian kredit mikro, program padat karya perdesaan, pelatihan keterampilan, dan sebagainya;

- c. Mengingat bahwa pendanaan program penanggulangan kemiskinan melalui belanja atau pengeluaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai Pasal 22, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan), maka demi tercapainya tujuan program penanggulangan kemiskinan diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlunya peningkatan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota tersebut agar masalah-masalah dalam program seperti kebocoran (korupsi), pemborosan dan penyimpangan pengalokasian anggaran serta pengeluaran atau belanja pemerintah

yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan, sehubungan dengan pembuktian empiris penelitian ini yang memang menunjukkan pengaruh belanja daerah yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan melakukan audit kinerja atas belanja sosial bantuan rumah, belanja untuk pendidikan dan kesehatan gratis di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, belanja program Getarbangdes yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dan lainnya. Audit kinerja untuk kesejahteraan ini penting untuk dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atau pemanfaatan anggaran daerah pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, khususnya pada belanja yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty. *World Development*, 32(12), The World Bank. Washington DC.
- Agussalim. (2012). *Memaknai Angka Kemiskinan Sulawesi Selatan*. Makassar: Nala Cipta Litera dan PSKMP UNHAS.
- Alawi, N. (2006). *Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2004*. Thesis. Universitas Indonesia.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

- Bappenas. (2002). *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan*. Jakarta: Bappenas.
- Bourguignon, F. (2004). *Poverty-Growth-Inequality Triangle*, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, on February 4, 2004.
- BPS. (2014). *Data Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014*.
- Chambers. (1998). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chriswardani, S. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jakarta: LP3ES.
- DJPK. (2014). Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010-2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghazali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan., & Quibria. (2002). *Poverty and Patterns of Growth*. ERD Working Paper No.18. Economic and Research Department. Asian Development Bank.
- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto., & Dwi. (2007), Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Paper Ekonomi*, Jakarta.
- Hudaya, D. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Hureirah, A. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air) Bandung.
- International Monetary Fund. (2015). *World Economic Outlook*. April 2015.
- Mankiw, N. G. (2006). *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publisher, New York.
- R. Nurkse, 1953, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford Basis Blackwell.
- Manurung, J. J., dkk. (2005). *Ekonometrika*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Elex Media Computindo.
- Myrdal, G. (2000). *Obyektivitas Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Octaviani, D. (2001). Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Ekonomi*, 7(8), 100-118.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Economics And Policy (Jejak)*, 8(1), 1-88.
- Ramadhan, M. N. (2014). *Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009-2012*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ravallion, M., & Bidani, B. (1996). How Robust is Poverty Profile?, *World Bank Economic Review*, 8, 75-102.
- Ravallion, M. (2001). *Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages*. World Bank.
- Saubani, A. (2015). *806.350 Rakyat Miskin Tinggal di Sulsel*. Republika Online 20 Mei 2015 diakses dari <http://www.epaper.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/05/20/nomr4622-806350-rakyat-miskin-tinggal-di-sulsel>.
- Siregar., & Wahyuniarti. (2007). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan faktor lain terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1998-2006*.
- Son & Kakwani. (2003). Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. *The Pakistan Development Review*, 42(4), Part 1, 417-444.

- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, W. W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN Yogyakarta.
- World Bank. (2002). *Introduction to Poverty Analysis atau Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- World Bank. (2006). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong